

STRATEGI KOLABORASI PENDEKATAN SOFT POWER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGANAN TERORISME DI WILAYAH POSO – SULAWESI TENGAH

Kusnandar Hidayat^{1*}, Haposan Simatupang², Tommy Arief Susanto³

^{*1}adifazahridayat@gmail.com, ²haposansitumorang@gmail.com

¹Universitas Pertahanan, ²Sekolah Komando TNI, ³Universitas Pertahanan

* email penulis/koresponden: adifazahridayat@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, dengan pendekatan soft power. Kolaborasi ini berfokus pada strategi humanis, seperti pembangunan infrastruktur, program pembinaan masyarakat, dan operasi teritorial yang bertujuan memenangkan hati masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan literature review dan meta-analisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam sinergi antara kedua institusi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendekatan soft power efektif dalam mengurangi radikalisasi, kolaborasi TNI dan Polri masih menghadapi hambatan koordinasi dan interoperabilitas di lapangan. Perbedaan budaya organisasi dan tumpang tindih otoritas menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas operasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan terpadu, penggunaan teknologi komunikasi yang lebih baik, dan pembentukan komando gabungan untuk memperkuat strategi penanganan terorisme di Poso dan wilayah lain yang berisiko.

Kata Kunci: Kolaborasi TNI-Polri, Terorisme, Soft Power, Poso, Koordinasi Operasional

Abstract. *This study evaluates the collaboration between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in countering terrorism in Poso, Central Sulawesi, through a soft power approach. The collaboration emphasizes humanitarian strategies, such as infrastructure development, community engagement programs, and territorial operations aimed at winning the hearts and minds of the local populace. Using qualitative methods, including literature review and meta-analysis, the research identifies the challenges and opportunities within the synergy between these institutions. Findings indicate that while the soft power approach effectively reduces radicalization, the TNI-Polri collaboration faces coordination and interoperability challenges in the field. Organizational culture differences and overlapping authorities are primary obstacles that must be addressed to enhance operational effectiveness. The study recommends increased joint training, improved communication technology, and the establishment of a unified command structure to strengthen counterterrorism strategies in Poso and other high-risk areas.*

Keywords: *TNI-Polri Collaboration, Terrorism, Soft Power, Poso, Operational Coordination.*

1. Pendahuluan

Konflik dan terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, telah menjadi permasalahan kompleks yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Sejak akhir 1990-an, Poso menjadi titik episentrum konflik sektarian yang kemudian berkembang menjadi

basis aktivitas terorisme dengan jaringan internasional yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal seperti Al-Qaeda dan ISIS (Satria, 2022). Situasi ini menuntut upaya penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia, terutama melalui kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berperan sentral dalam operasi kontra-terorisme di wilayah tersebut.

Ancaman terorisme di Indonesia bersifat lintas sektoral dan melibatkan jaringan yang beroperasi di berbagai negara. Hal ini menuntut adanya koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Salah satu indikasi dari jaringan terorisme internasional ini adalah keterlibatan kelompok-kelompok lokal yang berafiliasi dengan organisasi teroris global, memperkuat koneksi antarnegara dalam pergerakan terorisme (Meijer, 2012). Sebagai respons, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya perang melawan terorisme (Abuza, 2006).

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memperkuat langkah pemberantasan terorisme melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, kewenangan Polri mencakup tindakan preventif, penindakan melalui penyidikan dan penangkapan, serta pemulihan melalui rehabilitasi dan reintegrasi. Di sisi lain, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Polri meminta bantuan TNI dalam situasi mendesak untuk mengatasi ancaman terorisme.

Kolaborasi antara TNI dan POLRI bukan hanya penting dari segi taktis, tetapi juga strategis, dalam menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa TNI dapat membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada perbantuan, tetapi juga meliputi operasi-operasi yang lebih komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun, meski kerangka hukum telah tersedia, implementasi kolaborasi ini sering kali menghadapi kendala koordinasi di lapangan (Jones, 2018).

Sejarah penanganan terorisme di Poso menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI dan POLRI telah berlangsung sejak awal 2000-an dengan operasi-operasi seperti Operasi Tinombala dan Operasi Madago Raya. Operasi Madago Raya, sebagai kelanjutan dari Operasi Tinombala, bertujuan menumpas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Ali

Kalora. Polri berperan dalam operasi penegakan hukum, sementara TNI berfokus pada operasi teritorial dan komunikasi sosial yang lebih menitikberatkan pada pendekatan humanis dan *soft power* (Satria, 2022).

Pendekatan *soft power* yang diterapkan oleh TNI dan POLRI di Poso berusaha memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat. Pendekatan ini dilakukan melalui operasi teritorial, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi radikalisme dari akar rumput. TNI sering terlibat dalam kegiatan seperti pembangunan fasilitas umum, sementara POLRI menjalankan program-program preventif melalui Bhabinkamtibmas yang berfokus pada pendekatan langsung ke Masyarakat (Widodo et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan teori *soft power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004), di mana kekuatan daya tarik dan persuasi digunakan sebagai alternatif dari kekuatan militer.

Namun, efektivitas kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perbedaan budaya organisasi antara TNI dan POLRI yang sering kali menghambat koordinasi di lapangan. Tumpang tindih otoritas dan komando dalam operasi juga menjadi isu yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa operasi penanggulangan terorisme dapat berjalan lebih efektif. Sebagai contoh, terdapat kasus-kasus di mana kesalahpahaman antara komando TNI dan POLRI mengakibatkan kebingungan di lapangan dan menghambat respons terhadap serangan teroris (Haripin et al., 2020).

Meskipun kolaborasi TNI dan POLRI di Poso telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam koordinasi yang dapat menghambat efektivitas kolaborasi mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam upaya kontra-terorisme, interoperabilitas antara kedua lembaga masih perlu ditingkatkan (Widodo et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kerangka kerja sama dan penyempurnaan koordinasi operasional menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis strategi kolaborasi yang telah diterapkan, tetapi juga berupaya untuk mengusulkan strategi-strategi baru yang dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi TNI dan POLRI dalam konteks penanggulangan terorisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan strategi nasional dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia, serta memperkuat sinergi antara TNI dan POLRI dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

Keberhasilan strategi kolaboratif antara TNI dan POLRI di Poso juga dapat menjadi model bagi penanganan terorisme di wilayah lain di Indonesia yang memiliki potensi konflik serupa.

Dengan belajar dari pengalaman di Poso, diharapkan strategi kolaborasi ini dapat diadopsi dan disesuaikan untuk menghadapi tantangan keamanan yang ada di wilayah lain, sehingga Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perang global melawan terorisme.

2. Tinjauan Pustaka

Teori *Soft Power*. Teori *Soft Power* yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004) menekankan bahwa kekuatan sebuah negara atau institusi tidak hanya berasal dari kemampuan militernya tetapi juga dari daya tarik dan persuasi. Dalam konteks penanganan terorisme di Poso, pendekatan *soft power* digunakan oleh TNI dan POLRI melalui pembangunan infrastruktur, program pembinaan masyarakat, dan operasi teritorial yang bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan diharapkan mampu mengurangi radikalisasi masyarakat dengan membangun kepercayaan mereka terhadap aparat keamanan.

Teori *Counterinsurgency (COIN)*, menurut Kilcullen (2011), menekankan bahwa operasi militer yang sukses tidak hanya berfokus pada penghapusan musuh, tetapi juga pada usaha pemulihan dan pembangunan pasca-konflik untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Di Poso, teori ini relevan karena setelah operasi kontra-terorisme yang dilakukan oleh TNI dan POLRI, perlu diikuti dengan langkah-langkah pembangunan sosial dan ekonomi untuk mencegah kembalinya radikalisasi di masyarakat.

Teori *Manajemen Konflik* yang dijelaskan oleh Rahim (2002) menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dan kepemimpinan dalam menyatukan berbagai elemen organisasi untuk bekerja sama dalam mengatasi konflik. Dalam kolaborasi antara TNI dan POLRI di Poso, perbedaan budaya organisasi sering kali menyebabkan gesekan di lapangan, dan teori ini menekankan perlunya manajemen konflik yang baik untuk memastikan bahwa tujuan bersama dapat tercapai tanpa friksi yang menghambat efektivitas operasi.

Teori *Kepemimpinan Situasional* yang dikembangkan oleh Hersey & Blanchard (1977) menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif harus fleksibel dan adaptif, menyesuaikan pendekatan dengan kondisi di lapangan. Dalam operasi gabungan antara TNI dan POLRI di Poso, pemimpin di lapangan diharapkan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang dinamis, terutama ketika menghadapi tantangan operasional dan perbedaan budaya organisasi antara kedua lembaga.

Teori Kerjasama Antar-Organisasi dari **Huxham & Vangen (2013)** menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara berbagai organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kolaborasi TNI dan POLRI di Poso, teori ini relevan karena keberhasilan operasi gabungan sangat bergantung pada kemampuan kedua lembaga untuk bekerja sama secara efektif, berbagi informasi, dan mempercayai peran masing-masing dalam penanganan terorisme.

Teori Komunikasi Persuasif yang dikemukakan oleh **Petty & Cacioppo (1988)** berfokus pada bagaimana pesan dapat disampaikan dengan cara yang efektif untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam operasi di Poso, TNI dan POLRI menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan narasi anti-radikalisasi kepada masyarakat melalui program-program seperti dialog dengan tokoh agama dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang aparat keamanan dan upaya kontra-terorisme.

Teori Social Exchange oleh **Homans (1974)** menjelaskan bahwa hubungan sosial didasarkan pada timbal balik antara individu atau kelompok, di mana tindakan positif akan memperkuat hubungan. Di Poso, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi yang positif antara aparat keamanan dan masyarakat lokal, melalui pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat memperkuat hubungan dan mengurangi potensi konflik.

Teori Kepemimpinan Transformasional yang diajukan oleh **Bass (1985)** berpendapat bahwa pemimpin yang efektif harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam kolaborasi antara TNI dan POLRI di Poso, pemimpin yang mampu memotivasi dan menyatukan kedua lembaga dengan tujuan yang jelas akan meningkatkan efektivitas operasi gabungan dalam menghadapi terorisme.

Teori Adaptasi Strategis, menurut **Mintzberg (1994)**, menyatakan bahwa strategi yang sukses harus disesuaikan dengan konteks dan dinamika lokal. Dalam operasi kontra-terorisme di Poso, adaptasi strategi berdasarkan kondisi sosial, politik, dan budaya local sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan unik di wilayah tersebut.

Teori Komunikasi Dialogis dari **Freire (2020)** menekankan pentingnya interaksi berbasis dialog dalam menciptakan pemahaman dan perubahan sikap. Di Poso, pendekatan dialogis digunakan oleh TNI dan POLRI untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan tokoh lokal, dengan tujuan mengurangi ketegangan dan mencegah radikalisasi melalui pendekatan yang lebih persuasif dan humanis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review dan meta-analisis, berfokus pada fenomena kolaborasi antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, khususnya dalam konteks pendekatan soft power (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan literatur yang relevan, termasuk studi akademik, laporan operasional, dokumen resmi pemerintah, serta artikel dari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas kerjasama antara TNI dan Polri serta pendekatan soft power dalam konteks kontra-terorisme. Meta-analisis dilakukan dengan menganalisis temuan-temuan dari berbagai studi yang terkait, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, serta strategi efektif dalam kolaborasi kedua institusi tersebut.

Instrumen utama dalam metode ini adalah peneliti yang secara sistematis mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis studi yang relevan untuk memahami strategi kolaborasi yang diterapkan oleh TNI dan Polri. Proses meta-analisis mengacu pada panduan dari Timulak (2014), yang melibatkan langkah-langkah seperti penyusunan kriteria inklusi dan eksklusi untuk studi yang dianalisis, penilaian kualitas studi, dan pengodean data berdasarkan kategori atau tema yang muncul dari literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994), yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dalam konteks literature review, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari berbagai literatur, terutama yang terkait dengan strategi soft power dan kolaborasi TNI-Polri. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang merangkum temuan-temuan utama, serta tabel atau grafik untuk memperjelas pola kolaborasi yang diidentifikasi dalam studi terdahulu. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan awal dari hasil analisis literatur dan meta-analisis, yang memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas pendekatan soft power dalam penanganan terorisme di Poso, serta sinergi antara TNI dan Polri (Cohen et al., 2017).

Dengan metode ini, penelitian mampu mengungkap pola dan strategi kolaborasi yang paling efektif, serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi terorisme di Poso.

4. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Operasi Kontra-Terrorisme di Poso

Operasi kontra-terorisme di Poso, termasuk Operasi Madago Raya, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kelompok teroris di wilayah Sulawesi Tengah. Operasi ini adalah lanjutan dari beberapa operasi sebelumnya seperti Operasi Tinombala, yang bertujuan untuk menangkap sisa-sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Ali Kalora. Keberhasilan operasi ini dapat dilihat dari penurunan aktivitas terorisme dan penangkapan sejumlah anggota kelompok teroris. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada medan yang sulit dan topografi Poso yang kompleks, tetapi juga keterbatasan intelijen dan dukungan logistik yang dapat menghambat keberhasilan operasi (Agitia et al., 2024).

Dari perspektif keamanan dan stabilitas, keberhasilan Operasi Madago Raya tidak hanya diukur dari berkurangnya ancaman teroris, tetapi juga dari seberapa efektif upaya tersebut dalam memulihkan rasa aman di kalangan masyarakat lokal. Menurut Teori *Counterinsurgency* (COIN), operasi militer yang sukses harus diikuti oleh upaya pemulihan dan pembangunan untuk mencegah radikalisme lebih lanjut (Kilcullen, 2011). Dalam kasus Poso, stabilitas masih rentan terganggu karena masalah ekonomi dan ketidakpuasan sosial yang masih tinggi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kontra-terorisme harus mencakup program-program pembangunan sosial ekonomi sebagai langkah preventif jangka panjang.

Implementasi operasi juga menghadapi tantangan terkait hak asasi manusia. Beberapa laporan menunjukkan bahwa operasi-operasi di Poso kerap diwarnai dengan tuduhan pelanggaran HAM, yang justru berpotensi memicu sentimen anti-pemerintah di kalangan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa operasi militer yang terlalu represif bisa menjadi kontraproduktif dan memperpanjang siklus kekerasan (Armanto et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan seimbang antara keamanan dan perlindungan HAM dalam operasi kontra-terorisme.

Kolaborasi antara TNI dan POLRI dalam operasi ini juga menghadapi tantangan koordinasi dan sinergi. Polri bertugas untuk penegakan hukum, sementara TNI lebih berfokus pada operasi teritorial dan dukungan taktis. Pembagian peran ini sering kali menimbulkan gesekan, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menangani situasi di lapangan. Teori Manajemen Konflik menyarankan bahwa keberhasilan kolaborasi antar-lembaga sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen dengan cara yang koheren (Rahim, 2002).

Ke depan, keberlanjutan keberhasilan operasi kontra-terorisme di Poso memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek militer tetapi juga pada

peningkatan kapasitas lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman dari negara lain seperti Filipina dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan operasi militer dengan program pembangunan sosial mampu memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dalam menurunkan tingkat radikalisasi (Firmansyah & Wibowo, 2024).

Kolaborasi Taktis TNI dan POLRI

Kolaborasi antara TNI dan POLRI dalam operasi kontra-terorisme di Poso menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan ancaman teroris. Polri, sebagai penanggung jawab utama penegakan hukum, memiliki kewenangan dalam investigasi, penangkapan, dan pemrosesan hukum para tersangka teroris. Di sisi lain, TNI memberikan dukungan operasional melalui penyediaan personel dan kemampuan khusus, seperti unit pasukan khusus yang terlatih untuk operasi di medan sulit. Peran ini sering kali tumpang tindih, yang dapat menyebabkan kebingungan di lapangan jika tidak ada koordinasi yang jelas (Widodo et al., 2023).

Pembagian peran yang efektif memerlukan pemahaman bersama tentang prosedur operasi standar dan kejelasan dalam komando dan kontrol. Literatur tentang Teori Kerjasama Antar-Organisasi menekankan pentingnya komunikasi yang transparan, saling percaya, dan pembagian informasi yang terbuka untuk mencapai tujuan bersama (Huxham & Vangen, 2013). Dalam konteks Poso, tantangan utama adalah menyatukan dua budaya organisasi yang berbeda, di mana TNI lebih berorientasi pada kedisiplinan militer, sementara POLRI lebih berfokus pada pendekatan hukum dan pengumpulan bukti.

Tantangan koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam prosedur operasi standar, terutama dalam situasi darurat di mana keputusan harus diambil dengan cepat. Kesalahan koordinasi dapat berdampak pada keberhasilan operasi dan bahkan keselamatan personel di lapangan. Menurut penelitian nasional, perbedaan ini sering kali menyebabkan mis-komunikasi yang berdampak negatif terhadap efektivitas operasi gabungan (Widodo et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas komunikasi dan pelatihan bersama menjadi sangat penting untuk meminimalisir hambatan-hambatan ini.

Selain itu, tantangan budaya organisasi juga muncul dari perspektif kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pemimpin TNI dan POLRI di lapangan harus mampu mengintegrasikan berbagai elemen taktis dan strategi dengan cara yang adaptif. Teori Kepemimpinan Situasional menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam konteks operasi militer-polisi gabungan

harus fleksibel, mampu menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi, dan memprioritaskan sinergi antara berbagai komponen (Hersey & Blanchard, 1977).

Untuk memperkuat kolaborasi, perlu adanya upaya peningkatan interoperabilitas antara TNI dan POLRI melalui pelatihan terpadu dan peningkatan sistem komunikasi di lapangan. Belajar dari pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dengan operasi gabungan antara militer dan penegak hukum dalam menangani terorisme domestik, menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesamaan tujuan, kejelasan peran, dan kepemimpinan yang efektif (Horgan & Taylor, 2020).

Implementasi Pendekatan *Soft Power*

Pendekatan *soft power* dalam operasi kontra-terorisme di Poso melibatkan berbagai strategi humanis yang dilakukan oleh TNI dan POLRI, seperti operasi teritorial, program pembinaan masyarakat, dan Bhabinkamtibmas. Operasi teritorial oleh TNI tidak hanya berfokus pada aspek keamanan tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan (Armanto et al., 2019). Sementara itu, program Bhabinkamtibmas yang dilakukan oleh POLRI bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, serta berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik lokal.

Menurut Teori *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye, kekuatan sebuah negara atau institusi dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat adalah elemen penting dalam strategi keamanan (Nye, 2004). Dalam konteks Poso, pendekatan ini bertujuan untuk meredam potensi radikalisme dan meningkatkan stabilitas sosial dengan cara membangun hubungan baik antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Dampak positif dari pendekatan ini terlihat dalam penurunan ketegangan antara masyarakat dengan aparat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.

Implementasi *soft power* juga mencakup penyebaran narasi positif yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh propaganda teroris di kalangan masyarakat. Misalnya, TNI dan POLRI kerap melakukan dialog terbuka dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda setempat sebagai upaya untuk mempromosikan perdamaian dan menolak radikalisme. Pendekatan ini, yang didukung oleh Teori Komunikasi Persuasif, membantu mengubah persepsi masyarakat dan memperkuat dukungan terhadap upaya kontra-terorisme (Petty & Cacioppo, 1988).

Namun, meski pendekatan *soft power* membawa banyak dampak positif, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keberlanjutan program dan dukungan anggaran. Program-program ini

sering kali tergantung pada situasi politik dan alokasi sumber daya yang terbatas. Literatur nasional menunjukkan bahwa tanpa komitmen jangka panjang dari pemerintah, program-program soft power ini rentan terhadap gangguan dan dapat kehilangan efektivitasnya (Widodo et al., 2023).

Secara keseluruhan, pendekatan soft power yang diimplementasikan oleh TNI dan POLRI di Poso merupakan langkah penting dalam menciptakan keamanan yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan pendekatan ini dapat menjadi model bagi operasi kontra-terorisme di wilayah lain di Indonesia, dengan catatan bahwa strategi ini harus disertai dengan evaluasi berkala dan penyesuaian berdasarkan dinamika sosial-politik setempat.

Tantangan Koordinasi dan Interoperabilitas:

Koordinasi dan interoperabilitas antara TNI dan POLRI dalam operasi kontra-terorisme sering menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas operasi di lapangan. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih otoritas, di mana kedua institusi memiliki mandat yang terkadang saling bersinggungan. Dalam operasi di Poso, misalnya, ada kasus di mana komando di lapangan menjadi tidak jelas karena adanya dualisme kepemimpinan antara komandan militer dan polisi (Prasetyo, 2023). Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan di antara personel dan menurunkan responsivitas terhadap situasi yang berkembang cepat.

Faktor penghambat kolaborasi lainnya adalah perbedaan budaya organisasi antara TNI dan POLRI. TNI, dengan struktur yang lebih hirarkis dan berorientasi pada operasi tempur, sering kali beroperasi dengan pendekatan yang lebih langsung dan agresif. Sementara itu, POLRI yang lebih berorientasi pada penegakan hukum cenderung mengutamakan pengumpulan bukti dan prosedur hukum (Armanto et al., 2019). Teori Manajemen Konflik menyatakan bahwa perbedaan budaya ini bisa menyebabkan friksi, terutama dalam pengambilan keputusan di lapangan (Rahim, 2002).

Kurangnya interoperabilitas juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam sistem komunikasi dan intelijen yang digunakan oleh kedua institusi. Dalam situasi kritis, perbedaan ini dapat memperlambat arus informasi yang penting untuk pengambilan keputusan taktis. Penelitian Widodo et al. (2023) menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk dapat menyebabkan terhambatnya mobilisasi pasukan dan respons terhadap ancaman, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas operasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi dalam berbagi informasi dan peningkatan interoperabilitas teknologi komunikasi menjadi hal yang krusial.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi dalam struktur komando dan kontrol yang lebih integratif. Model koordinasi yang lebih sentralistik dengan komando tunggal dapat menjadi solusi, seperti yang diterapkan di beberapa negara yang telah menggabungkan fungsi militer dan penegakan hukum dalam penanganan terorisme (Satria, 2022). Penekanan pada pelatihan bersama yang menggabungkan prosedur operasi standar (SOP) antara TNI dan POLRI juga penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing dalam operasi.

Terakhir, kepemimpinan yang kuat di lapangan menjadi elemen kunci dalam memastikan operasi berjalan lancar. Teori Kepemimpinan Transformasional menekankan bahwa pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim lintas institusi untuk bekerja bersama secara efektif meskipun ada perbedaan (Bass, 1985). Kepemimpinan yang dapat menjembatani perbedaan budaya dan prosedural antara TNI dan POLRI akan sangat berpengaruh dalam menciptakan sinergi yang lebih baik.

Dampak Sosial dan Kultural dari Operasi *Soft Power*

Pendekatan soft power yang diterapkan oleh TNI dan POLRI dalam operasi kontra-terorisme di Poso membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Melalui program-program seperti operasi teritorial dan kegiatan pembinaan masyarakat, aparat keamanan tidak hanya dilihat sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan komunitas (Widodo et al., 2023). Pendekatan ini berhasil membangun kepercayaan dan mengurangi jarak antara aparat keamanan dan masyarakat, yang sebelumnya sering merasa terasing atau bahkan takut.

Respons masyarakat terhadap operasi soft power umumnya positif, terutama karena keterlibatan langsung aparat dalam kegiatan sosial seperti pembangunan infrastruktur desa, edukasi, dan layanan kesehatan gratis. Menurut teori Social Exchange, interaksi yang positif dan saling menguntungkan antara aparat dan masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi potensi konflik (Homans, 1974). Di Poso, keberadaan aparat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah membantu menciptakan citra yang lebih humanis dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap negara.

Namun, ada pula tantangan dalam implementasi soft power, terutama terkait dengan keberlanjutan program dan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Beberapa program soft power, meskipun sukses jangka pendek, sering kali tidak dilanjutkan karena kurangnya sumber daya atau perubahan prioritas kebijakan. Ini dapat menyebabkan masyarakat

merasa dikecewakan dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah (Armanto et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang program soft power yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Pendekatan ini juga memiliki dampak kultural, di mana nilai-nilai perdamaian dan antiradikalisme lebih mudah disampaikan melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, program dialog bersama tokoh agama lokal yang dilakukan oleh TNI dan POLRI telah berhasil menurunkan ketegangan dan mendorong masyarakat untuk menolak pengaruh radikalisme. Menurut Teori Komunikasi Dialogis, interaksi berbasis dialog dapat menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi persepsi dan sikap (Freire, 2020).

Keseluruhan dampak dari pendekatan *soft power* ini menunjukkan bahwa strategi humanis dalam operasi keamanan dapat menjadi salah satu kunci dalam memerangi terorisme di tingkat akar rumput. Namun, pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari pendekatan ini agar tetap relevan dan efektif dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Usulan Strategi Perbaikan Kolaborasi

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antara TNI dan POLRI dalam operasi kontra-terorisme, sejumlah strategi dapat diusulkan. Pertama, pembentukan satuan tugas gabungan dengan komando yang terpusat dapat membantu mengatasi masalah koordinasi dan memperjelas rantai komando. Model seperti ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam mengintegrasikan berbagai fungsi keamanan (Mashuri et al., 2022). Komando terpusat juga memungkinkan adanya integrasi intelijen dan pembagian tugas yang lebih jelas antara penegakan hukum dan operasi militer.

Kedua, peningkatan pelatihan bersama yang fokus pada komunikasi lintas institusi dan prosedur operasi gabungan sangat diperlukan. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga dan bagaimana mereka dapat berkolaborasi secara efektif di lapangan. Studi dari operasi gabungan internasional menunjukkan bahwa pelatihan bersama adalah salah satu faktor paling penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan mengurangi friksi antar-organisasi (Widodo et al., 2023).

Ketiga, implementasi teknologi canggih untuk komunikasi dan manajemen informasi dapat mempercepat respons dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Penggunaan sistem manajemen krisis yang terintegrasi dapat membantu mempercepat alur informasi antara TNI dan POLRI, sehingga keputusan dapat diambil dengan data yang lebih akurat dan relevan (Armanto

et al., 2019). Inovasi teknologi ini juga perlu disertai dengan protokol keamanan yang ketat untuk memastikan data sensitif tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, perlu ada penguatan kerangka hukum yang mendukung kolaborasi TNI dan POLRI dalam konteks operasi kontra-terorisme. Kebijakan yang memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing institusi dapat membantu mengurangi tumpang tindih dan memperjelas otoritas di lapangan. Teori Kebijakan Publik menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan terukur dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai aktor (Dunn, 2017).

Terakhir, pembentukan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang reguler akan memastikan bahwa setiap tantangan koordinasi dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Evaluasi operasional yang berkelanjutan akan membantu menyesuaikan strategi di lapangan dan meningkatkan efektivitas operasi secara keseluruhan.

Pembelajaran dari Kasus Poso untuk Daerah Lain

Kasus Poso menawarkan sejumlah pembelajaran berharga yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia yang menghadapi ancaman terorisme. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Pengalaman di Poso menunjukkan bahwa operasi militer yang tidak disertai dengan upaya pemulihan sosial ekonomi sering kali gagal menciptakan stabilitas jangka panjang (Mashuri et al., 2022).

Strategi *soft power* yang diterapkan di Poso juga dapat menjadi model bagi daerah lain, seperti Papua dan Aceh, yang memiliki dinamika konflik yang kompleks. Penerapan pendekatan humanis yang berfokus pada pembinaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian (Widodo et al., 2023). Di wilayah dengan sejarah panjang konflik, program-program yang membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman.

Kolaborasi antara TNI dan POLRI juga harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan konteks lokal. Pengalaman di Poso menunjukkan bahwa interoperabilitas dan koordinasi yang baik adalah kunci keberhasilan operasi gabungan. Daerah lain dapat belajar dari tantangan koordinasi di Poso dengan memperkuat struktur komando gabungan dan meningkatkan kapasitas operasional melalui pelatihan terpadu (Armanto et al., 2019).

Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya adaptasi strategi berdasarkan karakteristik lokal. Tidak semua pendekatan yang berhasil di Poso akan langsung efektif di daerah lain, sehingga perlu ada fleksibilitas dalam merancang strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Teori Adaptasi Strategis menekankan bahwa keberhasilan dalam suatu konteks tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mendalam tentang dinamika lokal (Mintzberg, 1994).

Secara keseluruhan, pembelajaran dari Poso dapat menjadi acuan bagi operasi kontra-terorisme di Indonesia dengan catatan bahwa setiap strategi harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan spesifik di lapangan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kolaborasi antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme di Poso telah menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sinergi antara kedua institusi ini, melalui operasi gabungan seperti Operasi Tinombala dan Madago Raya, mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menekan aktivitas terorisme dan mengurangi potensi radikalisasi. Pendekatan soft power yang diterapkan, seperti pembangunan infrastruktur dan program Bhabinkamtibmas, efektif dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat, menciptakan citra humanis yang mendekatkan aparat dengan publik. Meski begitu, masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki, seperti perbedaan budaya organisasi, tumpang tindih otoritas, dan kesulitan koordinasi, yang menghambat efektivitas di lapangan.

Pentingnya strategi holistik dalam penanganan terorisme di Poso menggarisbawahi kebutuhan integrasi antara upaya militer dan pembangunan sosial ekonomi. Program pembangunan pasca-konflik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi esensial untuk mencegah kembalinya radikalisasi. Pengalaman di Poso dapat menjadi pembelajaran berharga bagi wilayah lain di Indonesia yang menghadapi ancaman serupa. Pembentukan komando gabungan, peningkatan interoperabilitas, dan adaptasi strategi soft power sesuai dinamika lokal adalah langkah krusial untuk memperkuat efektivitas operasi gabungan TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan terorisme yang terus berkembang.

Rekomendasi. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi TNI dan Polri, disarankan pembentukan satuan tugas gabungan dengan komando yang terpusat guna mengurangi tumpang tindih otoritas dan memperjelas rantai komando. Peningkatan pelatihan terpadu yang fokus pada komunikasi lintas institusi dan prosedur operasi gabungan juga penting untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Selain itu, pemerintah perlu mendukung keberlanjutan program soft

power dengan alokasi anggaran yang memadai dan komitmen jangka panjang. Evaluasi rutin terhadap operasional dan strategi kolaborasi akan memastikan adaptasi yang tepat terhadap tantangan yang dinamis di lapangan.

Daftar Pustaka

- Anderson, K. F. (2021). *International Security Cooperation: Challenges and Opportunities*. Oxford University Press.
- Abuza, Z. (2006). *Political Islam and violence in Indonesia*. In *Political Islam and Violence in Indonesia*. <https://doi.org/10.4324/9780203969250>
- Agitia, G., Basir, B., & Handayani, R. S. (2024). *Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri*. *Jesya*, 7(2), 1605–1616. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1699>
- Armanto, H., Suwitri, S., Larasati, E., & Dwimawanti, I. H. (2019). LEARNING POLICY ON POLICE OPERATIONS OF TERRORISM TACKLING IN POSO DISTRICT Abstract. This article is about the study on the policy of police operation of terrorism tackling in Poso District. After the Poso conflict, Santoso led the East Indonesia. *The European Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.29013/ejhss-19-4-119-125>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. *Academy of Management Review*, 12(4).
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). *Research Methods in Education*. In *Research Methods in Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315456539>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition*. In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Firmansyah, Q., & Wibowo, P. (2024). Bilateral Cooperation between Philippines and the United States of America in Counterterrorism against ISIS and Abu Sayyaf Group. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.27840>
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed*. In *Toward a sociology of education*. In Routledge (pp. 374–386).

-
- Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2020). *The politics of counter-terrorism in post-authoritarian states: Indonesia's experience, 1998–2018*. Defense and Security Analysis. <https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1790807>
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1977). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, 3rd Ed.* Group & Organization Studies, 2(4). <https://doi.org/10.1177/105960117700200419>
- Homans, G. C. (1974). *Social behavior: Its elementary forms, Revised ed.* In *Social behavior: Its elementary forms, Revised ed.*
- Horgan, J., & Taylor, M. (2020). *Terrorism and Counter-Terrorism in a Multi-Centric World: Challenges and Opportunities.* In *The Future of Terrorism.* <https://doi.org/10.4324/9780203045138-19>
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). *Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage.* In *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage.* <https://doi.org/10.4324/9780203010167>
- Jones, S. (2018). *How ISIS Has Changed Terrorism in Indonesia.* In *International New York Times.* NA-NA. <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA553235292&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=22699740&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ed241ebdb&aty=open-web-entry>
- Kilcullen, D. (2011). *The accidental guerrilla: Fighting small wars in the midst of a big one.* Oxford University Press.
- Mashuri, S., Pettalongi, S. S., Nurdin, N., Paozia, P., & Yusran, Y. (2022). Schools Strategies in Countering Religious Radicalism in Post-Conflict Community in Poso Regency Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.1.2>
- Meijer, R. (2012). *Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia.* Netherlands Institute of International Relations 'Clingendae'.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman.* In *Thousand Oaks, California : Sage Publications: Vol.*
- Muryani, E., Sari, M. N., Mendrofa, S. A., Sugiyarti, S. R., Prihatin, E., Purnomo, D., ... & Mulyodiputro, D. (2024). *Manajemen Karier (Upaya Mencapai Kesuksesan Karier).* MEGA PRESS NUSANTARA.

-
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning: reconceiving roles for planning, plans, planners*. *Choice Reviews Online*, 32(01). <https://doi.org/10.5860/choice.32-0407>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1988). *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Persuasion*. *The Public Opinion Quarterly*, 52(2).
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Prasetyo, I. J. (2023). *Meningkatkan sinergitas TNI-Polri dalam deradikalisasi terhadap perkembangan terorisme di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. In *International Journal of Conflict Management (Vol. 13, Issue 3)*. <https://doi.org/10.1108/eb022874>
- Satria, A. (2022). *Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges*. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 14(5).
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). Definisi Dan Konsep. *Manajemen Sumber Daya Manusia, 1*.
- Timulak, L. (2014). *Qualitative meta-analysis*. In *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (pp. 481–495).
- Widodo, P., Somantri, G. R., & Rivai, A. H. S. G. A. (2023). Indonesian National Military Operation Cooperation (TNI) And The Police of the Republic Of Indonesia (POLRI) In Tackling the Threat of Terrorism in Poso. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(1), 3492–3502.